

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto,2011).

UMKM sendiri menurut Undang Undang republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di bagi menjadi 3 kriteria, yaitu

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Asean Economic Community merupakan program kerjasama negara-negara Asean, termasuk Indonesia, di bidang ekonomi. Program kerjasama yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini berbeda dengan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pasalnya,

Asean Economic Community ini menekankan pada pasar tunggal yang terbuka sesuai *blueprint* yang berisi empat patokan AEC.

Intinya, jika *Asean Economic Community* berhasil dijalankan, maka negara-negara Asean akan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Arus ekspor-impor barang dan jasa maupun investasi antar negara ASEAN akan lebih terbuka, sementara tarif dan non-tarif sudah tidak diberlakukan lagi.

Dengan diberikannya kemudahan untuk bertransaksi antar negara di Asia Tenggara, sebagai konsumen, kita akan mempunyai lebih banyak pilihan produk-produk berkualitas yang berasal dari kesembilan negara Asean. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana produsen lokal Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara Asean tersebut.

Keterbukaan pasar ini akan membawa dampak positif jika kita mampu menghasilkan produk berkualitas yang menembus pasar Asean. Namun, jika pada kenyataannya masyarakat Indonesia cenderung menjadi konsumen, tentu hal tersebut tidak akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara kita. Terutama mengingat Indonesia memiliki jumlah masyarakat yang terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Akan tetapi saat ini sedang ramai investasi besar-besaran ke dalam maupun luar negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan selain menarik minat investasi dari negara-negara tetangga yang tergabung di ASEAN, pemerintah juga akan memfasilitasi investasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta nasional di negara-negara ASEAN tersebut.

Untuk kawasan ASEAN investasi perusahaan Indonesia banyak dilakukan di Vietnam. Dia memperkirakan nilai investasi Indonesia ke Vietnam mencapai sekitar USD500 juta dan secara akumulasi termasuk periode sebelum lima tahun terakhir diperkirakan mencapai USD2 miliar. Oleh karena itu, saat pertemuan bilateral dengan PM Vietnam di sela-sela mengikuti KTT ASEAN, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar investasi pengusaha Indonesia ke Vietnam meningkat dan mendapat dukungan dari pemerintah Vietnam. BKPM akan memanfaatkan kantor perwakilannya di luar negeri yang dapat membantu mempertemukan perusahaan Indonesia dengan mitranya di luar negeri.

Sebagai contoh Kantor Perwakilan BKPM di Sydney membantu memfasilitasi investasi yang dilakukan oleh Japfa Comfeed (Santori) untuk membeli peternakan Sapi di Australia sebesar USD35 juta. BKPM pekan lalu juga memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman antara Blackmores dan PT Kalbe Farma Tbk di sela-sela kunjungan Menteri Perdagangan dan Investasi Australia di Indonesia.

Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis

global. Laporan *World Economic Forum* (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada *ranking* ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga *positioning* persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang

disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (*buffer*) perekonomian nasional.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005). Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

B. Rumusan masalah

Perumusan masalah merupakan bagian penting untuk dilakukan karena peneliti dapat fokus membahas masalah apa yang akan diteliti sehingga tidak keluar dari pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “*Mengapa UMKM harus di berdayakan dalam menghadapi AEC (Asean Economic Community) ?*”

C. Kerangka pemikiran

1. Agency Theory

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997); (Loudon and Loudon, 2007).

Pada pembahasan ini, implementasi dari teori keagenan yaitu dengan adanya kontrak kerja yang jelas antara UMKM di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini

di lakukan untuk mengantisipasi terjadi konflik kepentingan antar keduanya. Dengan adanya kontrak kerja, semua mekanisme kerjasamanya bisa di cantumkan dengan jelas. Mulai dari sistem kerjasama, sistem pembagian hasil sampai resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Maka dari itu pelaku UMKM dapat lebih giat mengembangkan usahanya dan tidak takut untuk bersaing di ASEAN karena terdapat kontrak kerja yang jelas.

2. Teori Kerjasama Internasional

Proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. (K.J Holsti, 1988)

Selain itu, kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai terdapatnya hubungan interdependia dan bertambah kompleknya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena National Understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik. (Koesnadi Kartasmita, 1977)

Pada pembahasan ini, implementasi dari teori kerjasama adalah adanya satu tujuan bersama yang ingin di capai oleh anggota ASEAN. Maka dari itu melalui AEC di

harapkan terjadi suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar Negara ASEAN. Misal melalui UMKM yang sedang gencar di gerakan untuk dapat bersaing di pasar ASEAN. Di samping itu juga menambah pendapatan bagi pelaku UMKM itu sendiri. UMKM juga dapat berkembang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dapat mengembangkan usahanya di lingkup ASEAN.

D. Hipotesa

Dari paparan teoritis diatas, maka dapat di tarik hipotesa, mengapa UMKM harus di berdayakan dalam menghadapi AEC (*Asean Economic Community*), sebab:

1. Meningkatkan daya saing
2. UMKM menciptakan lapangan kerja baru serta dapat menghidupi masyarakat

E. Tujuan penulisan

Tujuan dan sasaran dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Membahas secara ilmiah tentang bagaimana UMKM dapat di berdayakan dengan baik dalam menghadapi AEC
2. Menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesa yang dikemukakan.
3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.
4. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tema dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menetapkan jangkauan penelitian difokuskan pada alasan dan upaya upaya dalam memberdayakan UMKM pada tahun 2011 sampai tahun 2016

G. Metode penelitian

1. Pengumpulan data
2. Analisa data

H. Sistematika penulisan

Perkembangan sistematika penulisan dari skripsi ini dimulai dari Bab I yang terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penulisan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan skripsi. Pada Bab II ini membahas tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. Kemudian pada Bab III ini membahas tentang kebijakan-kebijakan mengenai UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pada Bab IV ini membahas latar belakang Indonesia mengikuti AEC (Asean Economic Community). Dan yang terakhir pada Bab IV membahas tentang kesimpulan.